

Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kelangkaan Gas LPG Subsidi di Indonesia

Lutfiani Dwi Lestari^{1*}, Meita Dwi Rahmawati², Minhatul Hasna³

^{1,2,3} Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: lutfianidwilestari@gmail.com, meitarahmwati105@gmail.com,

minhatulhasna2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received November 14, 2023

Revised November 29, 2023

Accepted December 12, 2023

Available online December 18, 2023

Corresponding author email :
lutfianidwilestari@gmail.com

Keywords:

Government Policy, Shortages,
Subsidized Gas

Abstract

Introduction: Recently, there has been a shortage of 3 kg subsidized LPG gas which has impacted lower middle class people who have difficulty getting 3 kg subsidized LPG gas from the government. This research aims to analyze how government policies address the problem of subsidized LPG gas scarcity in Indonesia. **Research Methods:** This method uses a qualitative descriptive analysis approach from books, journal articles and previous research. **Results:** The research results show that to overcome this scarcity problem, the government issued several policies to overcome the scarcity of subsidized gas, including increasing subsidized gas supplies in several areas, revoking fraudulent agents' permits, market operations in several areas, purchasing subsidized gas by bringing an ID card, strengthening distribution control, limiting purchases of subsidized gas, managing stock well, determining the right price according to market prices, and reviewing revise subsidy policies so that they remain sustainable and efficient. **Conclusion:** The government must consistently monitor the market, and the public must use subsidized 3 kg LPG gas wisely and not hoard it.

Page: 112-121

Journal of Economics and Social Sciences (JESS)
with CC BY license. Copyright © 2023, the
author(s)

PENDAHULUAN

Memahami bahwa ketahanan nasional adalah keadaan dinamis suatu negara dengan kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan nasional, terpadu, serta menjawab serta mengatasi berbagai tantangan, yang permasalahannya bersumber dari pihak dalam dan luar negeri (Permana & Sos, 2021). Ketahanan nasional Indonesia juga merupakan pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penegakan keseimbangan kesejahteraan dan keamanan di segala bidang kehidupan, yang sepenuhnya berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945 (Wiryawan, 2023). Kemandirian nasional dalam berbagai bidang sangat diperlukan dalam proses nasional. Untuk dapat maju dan berkembang khususnya di bidang perekonomian untuk menjaga dan menjaga kemandirian perekonomian nasional guna mencapai ketahanan perekonomian yang baik (Marlinah, 2017). Sebagaimana kita ketahui, sistem perekonomian Indonesia bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia (NKRI) (Sofyan, 2013). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan dan pemerataan penggunaan hasil pembangunan. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk memulihkan perekonomian melalui penciptaan lingkungan usaha yang sehat dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, ketersediaan barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, dan peningkatan daya saing dalam rangka persaingan global (Azizah & Muhfiatun, 2018). Namun dalam proses pelaksanaannya, pemulihan nasional di Indonesia khususnya di bidang perekonomian banyak menemui kendala, yang paling mengkhawatirkan adalah kekurangan gas LPG subsidi sebanyak 3 kg yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.

Peranan LPG (*Liquefied Petroleum Gas*) saat ini sangat penting dalam kehidupan manusia, baik di rumah maupun di industry (Putra et al., 2017). Gas LPG subsidi selain murah juga lebih mudah digunakan. Semua ibu rumah tangga mempunyai pendapat bahwa memasak dengan LPG lebih cepat dibandingkan dengan bahan bakar lain (kayu bakar atau minyak tanah), baik untuk memasak air, menanak nasi, memasak sayur, atau memasak lauk pauk (Kusniati, 2017). Hal ini sesuai dengan hasil penelitian sebelumnya bahwa sebagian besar ibu rumah tangga Indonesia merasa penggunaan LPG lebih cepat dibandingkan bahan bakar lainnya (minyak tanah). Hal ini sejalan dengan manfaat LPG dalam mempersingkat waktu memasak. Kebanyakan ibu rumah tangga sepakat bahwa memasak dengan LPG dapat menekan biaya. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, gas LPG subsidi juga penting di daerah lain. Industri pulp dan kertas juga bergantung pada LPG untuk pengeringan dan pembangkitan uap (Novitasari et al., 2023). Selain itu, farmasi, kimia, dan industri tekstil juga mengandalkan LPG bersubsidi sebagai bahan bakar untuk berbagai keperluan.

Gas minyak cair (LPG) PERTAMINA yang diberi merek ELPIJI, merupakan gas yang dihasilkan dari kilang minyak (BBM dan kilang gas), komponen utamanya adalah gas propana (C₃H₈) dan butana (C₄H₁₀) sekitar 99% dan sisanya adalah pentana (Andalucia, 2023). Gas (C₅H₁₂ cair) LPG lebih berat dari udara, mempunyai massa jenis sekitar 2,01 (dibandingkan udara), tekanan uap LPG cair di dalam silinder sekitar 5,0 hingga 6,2 kg/cm². LPG merupakan bahan bakar berupa gas minyak cair (*liquefied petroleum gas*) dan merupakan produk minyak

bumi ramah lingkungan yang banyak digunakan di rumah tangga dan industri (Yudisworo, 2014). Sejak tahun 2007 pemerintah merealisasikan program konversi minyak tanah ke LPG yang mana mencakup sebagian besar wilayah di Indonesia (Alim, 2020). Kelangkaan adalah keadaan dimana masyarakat ingin mengkonsumsi lebih banyak dari yang diproduksi atau keadaan dimana masyarakat menginginkan lebih dari apa yang tersedia (Anita, 2022). Kelangkaan bukan berarti barang sedikit atau terbatas, namun adanya kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan barang yang tersedia. Oleh karena itu, kelangkaan ini akan menimbulkan berbagai dampak yang berbeda-beda, terutama bagi masyarakat, bahkan akan membuat masyarakat semakin khawatir bahkan panik ketika kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi. Strategi pemerintah dalam program yang diarahkan guna mencapai nilai-nilai, tujuan dan perilaku yang lebih teratur seperti yang dipaparkan Lasswell dan Kaplan. (Tabo, 2018). Pemerintahan pada umumnya adalah suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan oleh lembaga atau badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencapai tujuan pemerintahan negara (tujuan nasional). Kebijakan pemerintah adalah serangkaian tindakan yang dipilih dan ditetapkan secara sah oleh pemerintah/negara kepada seluruh anggota masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi guna mencapai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh anggota masyarakat (Marzuki et al., 2021).

Akhir-akhir ini marak diberitakan mengenai kelangkaan gas LPG subsidi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini memiliki dampak yang signifikan pada masyarakat yang bergantung pada gas LPG subsidi sebagai sumber energi untuk memasak dan keperluan rumah tangga lainnya, terlebih bagi pedagang kecil. Masyarakat mengungkapkan bahwa mereka kesulitan mencari gas LPG subsidi tersebut. Pasalnya gas LPG subsidi yang seharusnya dialokasikan untuk masyarakat kurang mampu dapat disalahgunakan atau disimpangkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menindaklanjuti ini kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan alokasi, harga, atau penggunaan gas LPG subsidi dapat memengaruhi pasokan dan permintaan (Sakti, 2014). Perubahan kebijakan ini bisa menjadi faktor penyebab kelangkaan. Yang kemudian menjadi masalah serius bagi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan jawaban apa sajakah penyebab terjadinya kelangkaan gas LPG subsidi pada beberapa daerah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab adanya kelangkaan gas LPG subsidi di beberapa daerah Indonesia kemudian dijabarkan apa saja kebijakan pemerintah terkait masalah tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalihan dokumen (Anggito and Johan, 2018). Dalam analisis penulisan permasalahan ini menggunakan desain kualitatif *library research* yaitu mengumpulkan data pustaka yang diperoleh dari berbagai sumber informasi kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian seperti melalui abstrak hasil penelitian, indeks, review, jurnal dan buku referensi.

Kemudian data mentah disaring dengan memilih data yang paling relevan dan dikategorikan sesuai klasifikasi yang dibutuhkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Kelangkaan Gas LPG Subsidi

Liquefied Petroleum Gas 3 kg subsidi adalah program produk konversi BBM ke gas keluaran PT. Pertamina yang dijalankan sejak 2007. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban APBN terkait subsidi BBM, namun belakangan masyarakat diresahkan oleh kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg. Pemicu utama hal ini adalah disparitas harga yang sangat berbeda antara gas LPG subsidi 3 kg dengan LPG 12 kg sehingga menyebabkan banyak pengguna gas LPG 12 kg yang beralih ke gas LPG subsidi 3 kg yang seharusnya hanya untuk rakyat miskin. Atas dasar itu masyarakat yang membutuhkan tidak mendapatkan gas LPG subsidi 3 kg. Kemudian penyusutan stok, jika stok gas LPG subsidi tidak dikelola dengan baik oleh pemerintah atau perusahaan distribusi, maka dapat terjadi penipisan stok yang dapat menyebabkan kelangkaan. Isu terkait peluncuran bright gas non subsidi yang membuat masyarakat berpikir gas bersubsidi akan dihapuskan. Kelangkaan juga disebabkan oleh penyimpangan distribusi gas LPG subsidi 3 kg yang tidak merata (Wijaya & Erman, 2015).

Kenaikan harga gas pada daerah-daerah tertentu antara Rp24.000/tabung, Rp35.000/tabung, sampai Rp55.000/tabung. Atas kemunculan perbedaan harga HET ini lah yang mempengaruhi pendistribusian gas tidak merata, karena yayasan akan lebih memilih untuk menyalurkan lebih banyak ke daerah yang HET nya tinggi sehingga dapat meningkatkan keuntungan pribadi, padahal disisi lain permintaan atas gas LPG subsidi 3 kg semakin melonjak. Dengan kata lain kelangkaan akan gas LPG subsidi 3 kg memiliki hubungan searah, yaitu jika kelangkaan semakin meningkat maka keputusan pembelian juga meningkat, akibatnya para sub agen penyalur dapat dengan mudahnya memonopoli harga yang tidak sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Disinilah diperlukan prinsip keadilan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dampak Kelangkaan Gas LPG Subsidi di Kabupaten Pemalang

Kelangkaan gas LPG subsidi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di daerah Kabupaten Pemalang menjadi permasalahan yang cukup serius dan menjadi perhatian masyarakat. Masyarakat banyak yang mengeluhkan langkanya gas LPG subsidi 3 kg terutama dari masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dan para penjual produk kecil-kecilan. Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur mengatakan bahwa kelangkaan ini berdampak negatif terhadap produktivitas warga. Hal ini dikarenakan gas LPG subsidi telah menjadi bahan paling penting setelah minyak tanah ditarik dari masyarakat. Akibat dari kelangkaan gas LPG subsidi dapat menimbulkan beberapa dampak yang diantaranya masyarakat yang seharusnya berhak mendapatkan gas LPG subsidi kesulitan mendapatkannya, dan LPG merupakan kebutuhan pokok rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari kelangkaan gas LPG subsidi tersebut mengakibatkan banyak kalangan mulai menggunakan bahan bakar minyak atau kayu bakar. Dari minimnya pasokan

mengakibatkan pengecer kesulitan dalam stock gas LPG subsidi 3kg. Upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berupa gas LPG subsidi tidak sesuai yang diharapkan, namun kenyataannya dilapangan terjadi kelangkaan gas LPG subsidi yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.

Kebijakan Pemerintah Terkait Kelangan Gas Subsidi di Indonesia

Pemenuhan distribusi gas subsidi yang ditujukan pada masyarakat menengah kebawah, yang sepenuhnya dilakukan oleh Pertamina menggunakan sistem close loop supply chain merupakan siklus aliran produk mulai dari konsumen, kembali ke pabrik untuk diproses ulang yang kemudian kembali lagi ke konsumen sebagai produk baru (Hartiwati, 2017). Pengertian distribusi sendiri merupakan penyaluran jasa atau barang dari produsen kepada konsumen serta para pemakai, dimana barang atau jasa tersebut digunakan (Karundenget al., 2018).

Pada pelaksanaan pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg atau disebut juga gas LPG subsidi di beberapa daerah di Indonesia mengalami salah sasaran, yang pada awalnya tujuan adanya gas LPG subsidi 3 kg ditujukan pada masyarakat menengah ke bawah namun ternyata ada sebagian dari masyarakat yang bertaraf ekonomi mampu atau menengah ke atas mendapatkan elpiji 3 kg (Maulana, 2021). Kurang tepatnya sasaran gas LPG subsidi 3 kg yang ditujukan pada masyarakat menengah kebawah dimaksudkan guna membantu meminimalisir pengeluaran dari masyarakat menengah ke bawah.

Berdasarkan hal demikian, kurangnya pemerataan pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg ini bertentangan dengan prinsip distribusi keadilan dalam ekonomi syariah. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma yang diterima secara menyeluruh. Dalam sistem sosial keadaan yang memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi merupakan keadaan sosial yang benar.

Sistem distribusi secara adil dalam lingkup syariah bukanlah distribusi yang ditawarkan sosialis dengan sama rata dan kapitalisme dengan sistem pajak progresifnya. Akan tetapi keadilan distribusi yang diinginkan merupakan keadilan distribusi yang sejalan dengan nilai syariah sesuai yang di paparkan Afzalur Rahman (Aprianto, 2016). Tidak bisa dihindari bahwa keadilan dalam distribusi membutuhkan satu kondisi yang bisa menjamin adanya kesempatan yang sama pada setiap masyarakat Indonesia untuk berusaha mencapai apa yang diinginkan dengan kemampuan, namun tidak menuntut kesamaan hasil dari proses tersebut.

Dalam mengatasi permasalahan mengenai kelangkaan gas LPG subsidi 3kg yang baru-baru ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, berikut beberapa tindakan pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut :

1. Pertamina tambah pasokan LPG 3 kg subsidi di sejumlah wilayah

Alokasi anggaran subsidi LPG 3 Kg mencapai Rp117,85 triliun yang sesuai APBN tahun 2023. Dengan itu, agar tepat sasaran dan dapat bermanfaat bagi Masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Penegasan tersebut sesuai

yang disampaikan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Maompang Harahap dalam Sosialisasi Transformasi Subsidi LPG 3 Kg Tepat Sasaran Tahap IV dan V di Kantor Cabang Pertamina Bandung.

Sosialisasi di 151 kabupaten/kota di Jawa, Bali, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi diikuti secara daring oleh sekitar 3.500 penyalur (agen) dan sub penyalur (pangkalan). Penambahan pasokan yang mencapai 60 persen dibandingkan penyaluran normal didistribusikan bervariasi untuk masing-masing wilayah. Oleh karena itu, Pertamina mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian LPG 3 Kg secara berlebihan. Apabila masyarakat masih mengalami kesulitan dalam menemukan LPG 3 Kg atau adanya harga yang tidak wajar maka dapat mengajukan keluhannya kepada Pertamina. Pertamina melakukan operasi pasar bertujuan bukan hanya untuk menambah pasokan ke masyarakat, namun juga sebagai upaya untuk menstabilkan harga (Munawar, 2013). Sebab, pada operasi pasar ini, LPG 3 Kg dijual sesuai dengan harga eceran resmi di masing-masing daerah.

2. Pertamina akan cabut izin jika menemukan ada agen yang curang

Direktur Pemasaran PT Pertamina, Muchamad Iskandar, mengatakan belum menemukan indikasi adanya spekulasi melakukan penimbunan LPG 3 kilogram (Kg). Hal ini terkait kondisi terjadinya kelangkaan gas LPG bersubsidi 3 Kg di masyarakat. Kendati demikian, Iskandar tidak menutup kemungkinan terjadinya kondisi tersebut. Oleh karena itu, dia menyerahkan urusan tersebut kepada pihak yang berwajib.

Jika kemudian ditemukan ada agen yang bertindak curang seperti di Palangka Raya dapat dikenakan sanksi hingga pencabutan izin usaha. Untuk mengantisipasi terjadinya kondisi, Pertamina mengambil tindakan-tindakan pencegahan berupa sidak di lapangan.

3. Operasi Pasar yang dilakukan pemerintah

Sebagai upaya menstabilkan harga tabung gas LPG bersubsidi 3 kg menjelang Hari Raya Iduladha, Pemerintah Kota Palangka Raya menyalurkan 250 tabung gas LPG subsidi 3 kg. Tujuan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam mendapatkan gas LPG subsidi 3 kg dengan harga terjangkau sesuai dengan HET merupakan tujuan dari operasi pasar (Nurhasnah, 2020). Lebih lanjut Agus Arya Wibawa mengatakan, kegiatan operasi Pasar ini akan dilakukan secara serentak.

Dalam operasi pasar ini, setiap orang diizinkan membeli maksimal 3 tabung gas per bulan LPG dengan harga Rp 18 ribu per tabung. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pasokan gas LPG dapat merata dan mencukupi bagi seluruh masyarakat. Operasi pasar ini diharapkan menjadi solusi sementara hingga pasokan gas LPG subsidi 3 kg kembali normal di pasaran.

Dikarenakan hal tersebut himbauan dari pemerintah terhadap masyarakat untuk menggunakan gas LPG dengan bijak dan tidak melakukan penimbunan, sehingga pasokan dapat merata dan terjangkau bagi semua lapisan masyarakat.

4. PT Pertamina (Persero) mengharuskan pembelian gas LPG subsidi 3 kg bersubsidi membawa KTP sebagai pendataan

Alasan dari penggunaan KTP tersebut guna mensinkronkan dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai yang dijelaskan Pertamina Patra Niaga Irto Ginting. Yang nantinya, data P3KE akan diinput ke dalam web Subsidi Tepat milik Pertamina. Masyarakat tidak perlu mendownload aplikasi ataupun QR Code. Masyarakat cukup menunjukkan KTP-nya di pangkalan gas LPG saat membeli gas LPG subsidi 3kg seperti biasa. Kebijakan ini dilakukan pemerintah agar pendistribusian gas LPG subsidi 3 kg subsidi bisa benar-benar tepat sasaran.

5. Pembatasan pembelian gas LPG 3 kg subsidi

Pembatasan pembelian liquefied petroleum gas (LPG) tabung 3 kilogram (kg) efektif mulai 1 Januari 2024 sesuai yang diresmikan Kementerian Energi dan Sumber Mineral (ESDM). Nantinya hanya masyarakat yang telah terdata dalam system verifikasi PT Pertamina (Persero) yang dapat membeli gas LPG subsidi tersebut. Ketentuan pemerintah tersebut tertuang dalam lampiran Keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 99.K/MG.05/DJM/2023 yang ditetapkan pada tanggal Februari 2023. Pada awal tahun 2024 akan dimulai pemberlakuan bahwa hanya pengguna LPG tertentu yang telah terdata dalam sistem berbasis web atau web yang dapat membeli LPG tertentu (Huda et al., 2022).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, kementeriannya memutuskan untuk mengawasi pendataan pengguna LPG tertentu atau LPG 3 kg ke dalam sistem web atau aplikasi secara bertahap di wilayah kabupaten dan kota Jawa, Bali, Dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai 2023. Tutuka mengatakan tujuan aturan ini untuk mewujudkan pasokan LPG yang memadai dan dapat diakses masyarakat dengan harga terjangkau, serta menjaga daya beli masyarakat dan menjamin pendistribusian yang tepat sasaran. Serta evaluasi penghimpunan dan pengelolaan data penerima manfaat itu bakal dilaksanakan setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Tindakan mengantisipasi kelangkaan gas LPG di Indonesia

Pemerintah harus segera mengubah kebijakan subsidi harga tabung LPG 3kg dari subsidi harga menjadi subsidi harga sasaran (Widyaningrum, 2012). Konversi tersebut dilakukan dengan mengacu pada dua konsep utama, yaitu yang pertama mendapatkan harga yang tepat yakni menentukan harga tabung LPG 3 kg sesuai harga pasaran, yang kedua melindungi masyarakat miskin, memberikan bantuan penempatan kepada masyarakat yang membutuhkan.

1. Transformasi kebijakan tabung LPG subsidi 3 kg dapat dimulai dengan menghilangkan selisih harga antara produk LPG subsidi dan nonsubsidi. Harga LPG yang diterapkan adalah harga tunggal, yaitu harga yang mengikuti harga efisiensi keekonomian (mewakili optimalisasi dan efisiensi produksi unit usaha sebagai produsen) (Rahmawati, 2016).
2. Penghapusan perbedaan harga antara LPG bersubsidi dan non-subsidi harus dibarengi dengan perubahan desain kebijakan subsidi LPG berdasarkan transfer langsung kepada

kelompok penerima manfaat yang berhak, berdasarkan data yang dapat dipercaya. Dengan cara ini, mekanisme untuk melindungi kelompok rentan di masyarakat bisa efektif. Pemberian dukungan berbasis transfer langsung diyakini dapat menyelesaikan permasalahan inklusi dan kesenjangan kesalahan, sehingga kebenaran tujuan kebijakan dapat lebih terjamin.

3. Penting untuk mengambil langkah-langkah untuk memperkuat target penerima subsidi LPG. Penapisan yang ditargetkan dapat dimulai dari kelompok rumah tangga berdasarkan data yang tersedia. Selain itu, perbaikan dan penguatan data dasar mengenai situasi ketenagakerjaan, khususnya data mengenai pengusaha mikro, nelayan, dan petani sasaran harus menjadi prioritas pemerintah dalam jangka pendek.

Agar transisi kebijakan subsidi LPG dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang optimal, diperlukan langkah-langkah mitigasi yang tepat, antara lain:

1. Identifikasi target sasaran harus disertai dengan proses pengumpulan data yang valid sesuai dengan kondisi dan kriteria yang ditentukan misalnya, 40% masyarakat berpendapatan rendah.
2. Rancangan kebijakan konversi subsidi LPG harus mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok sasaran, seperti rumah tangga miskin dan rentan, usaha mikro, nelayan, dan petani kecil.
3. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur pendukung yang berfungsi dengan baik dan teruji yang diperlukan untuk menerapkan kebijakan baru.
4. Sosialisasikan kebijakan dengan komunikasi yang baik agar seluruh pihak yang berkepentingan memahami pentingnya tindakan yang diambil pemerintah, untuk menghindari keresahan sosial yang mungkin timbul di masyarakat.
5. Pendekatan politik untuk memperkuat implementasi kebijakan baru, baik regulasi (hukum) maupun kelembagaan.

KESIMPULAN

Program Liquefied Petroleum Gas LPG subsidi 3 kg dikeluarkan pemerintah dengan tujuan untuk mengurangi beban APBN terkait subsidi BBM, akan tetapi distribusi gas LPG subsidi 3 kg yang tidak merata berdampak pada masyarakat yang seharusnya menerima hak untuk mendapatkan subsidi pemerintah ini. Hal ini menyebabkan kelangkaan gas LPG subsidi pada beberapa daerah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Pematang Jaya. Maka beberapa upaya pemerintah dilakukan antara lain: PT Pertamina (Persero) tambah pasokan LPG 3 kg subsidi di sejumlah wilayah, Upaya mengatasi kelangkaan gas melalui Operasi Pasar sedang berlangsung di beberapa daerah, PT Pertamina (Persero) akan cabut izin jika menemukan ada agen yang curang, PT Pertamina (Persero) mengharuskan pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi membawa KTP sebagai pendataan, Pembatasan pembelian gas LPG 3 kg subsidi hanya untuk masyarakat yang telah terdata dalam sistem verifikasi. Maka diharapkan pemerintah mengambil langkah-langkah seperti memperkuat kontrol distribusi,

meningkatkan infrastruktur, mengelola stok dengan baik, menentukan harga yang tepat sesuai harga pasaran, dan mengkaji ulang kebijakan subsidi agar tetap berkelanjutan dan efisien. Selain itu, juga penting untuk mengedukasi masyarakat tentang penggunaan yang hemat dan efisien dari gas LPG serta menggalakkan sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan.

REFERENSI

- Alim, F. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Di Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Ilmiah Administratie*, 11(1), 51–62.
- Andalucia, S. (2023). Operasi Dan Troubleshooting Gas Compressor Di Stasiun Kompresor Gas (Skg) Lembak Pt Pertamina Hulu Rokan Region 1 Zona 4. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(5), 2133–2152.
- Anita, S. Y. (2022). Pengaruh Panic Buying Terhadap Minat Beli Konsumen Secara Impulse Buying Pada Produk Minyak Goreng. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 16(1), 72–84.
- Aprianto, N. E. K. (2016). Kebijakan Distribusi Dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, 8(2).
- Azizah, S. N., & Muhfiatun, M. (2018). Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft Dalam Menghadapi Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case Di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta). *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 17(2), 63–78.
- Hartiwati, E. N. (T.T.). *Rancang Bangun Website Pangkalan Gas Barokah Menggunakan Adobe Dreamweaver, Php Dan My Sql*.
- Huda, N., Astuti, E. S., Martawardaya, B., Purwanto, D. A., Listiyanto, E., & Fahmid, M. M. (2022). *Proyeksi Ekonomi Indonesia 2022: Pemulihan Di Atas Fundamental Rapuh*. Indef.
- Karundeng, T. N., Mandey, S. L., & Sumarauw, J. S. (2018). Analisis Saluran Distribusi Kayu (Studi Kasus Di Cv. Karya Abadi, Manado). *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 6(3).
- Kusniati, E. (2017). *Perilaku Ibu Rumah Tangga Dalam Penggunaan Peralatan Masak Di Desa Kalibaru Wetan Kecamatan Kalibaru Kabupaten Bayuwangi*. [Phd Thesis]. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 17(2), 258–265.
- Marzuki, C. V. S., Pasalbessy, J. D., & Patty, J. M. (2021). Aspek Melawan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Di Masa Psbb. *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(7), 672–678.
- Maulana, M. I. (2021). *Pelaksanaan Penjualan Gas Berdasarkan Perpres No 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas*

- Tabung 3 Kg Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru* [Phd Thesis]. Universitas Islam Riau.
- Munawar, D. (2013). Memahami Pengertian Dan Kebijakan Subsidi Dalam Apbn. *Academia Accelerating The World's Research*, 1–23.
- Novitasari, A. L., Windy, F. L. L., & Mukaromah, F. D. (2023). *Kelangkaan Gas Lpg 3 Kg Di Dukuh Kebumen, Kabupaten Pematang*. 2(2).
- Nurhasnah, N. (2020). *Analisis Terhadap Praktek Penetapan Harga Eceran Tertinggi Lpg 3 Kg Di Panca Lautang Kab. Sidrap* [Phd Thesis]. Iain Parepare.
- Permana, U., & Sos, S. (2021). *Pendidikan Kewarganegaraan; Buku Lovrinz Publishing*. Lovrinz Publishing.
- Putra, M. F., Kridalaksana, A. H., & Arifin, Z. (2017). *Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Gas Lpg Dengan Sensor Mq-6 Berbasis Mikrokontroler Melalui Smartphone Android Sebagai Media Informasi*.
- Rahmawati, A. (2016). *Analisis Target Costing Sebagai Upaya Peningkatan Laba Untuk Produksi Keripik Tempe Sanan: Studi Kasus Pada Home Industry Putra Ridlo Malang* [Phd Thesis]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Sakti, R. A. B. (2014). *Peranan Hukum Dalam Pembangunan (Analisis Kesesuaian Kebijakan Penetapan Harga Bbm Bersubsidi Pasal 7 Ayat (6a) Undang-Undang Apbn-P Tahun 2012 Dari Perspektif Pasal 33 Uud 1945 Dan Prinsip Hukum Ekonomi Islam)* [Phd Thesis]. Universitas Islam Indonesia.
- Sofyan, A. F. (2013). Pengaruh Transmigrasi Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Tepian Makmur Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai Timur. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 1(3), 1167–1180.
- Tabo, S. (2018). Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Di Kantor Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolmong Utara. *Gorontalo Journal Of Public Administration Studies*, 1(1), 47–55.
- Widyaningrum, N. A. (2012). Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (Lpg) Tabung 3 Kilogram. *Universitas Indonesia, Depok*.
- Wijaya, A., & Erman, E. (2015). *Fungsi Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dalam Mengatasi Kelangkaan Liquefied Petroleum Gas (Lpg) 3 Kg Tahun 2013* [Phd Thesis]. Riau University.
- Wiryanawan, B. (2023). Paradigma Baru Ekonomi Keluarga Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Untuk Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 66–79.
- Yudisworo, W. D. (2014). Studi Alternatif Penggunaan Bbg Gas Elpiji Untuk Bahan Bakar Mesin Bensin Konvensional. *Engineering: Jurnal Bidang Teknik*, 5(1).